

Efektivitas Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Teori Keynesian

Charles Fransiscus Ambarita^{1✉}, Ade Rahma Sintiya Siregar²

^{1,2}Universitas Negeri Medan, Indonesia

charlesambarita@unimed.ac.id

Abstract

This article discusses the effectiveness of government fiscal policy in promoting Indonesia's economic growth using the Keynesian theory perspective. The research was conducted using a quantitative descriptive approach with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for the period 2019–2023, covering macroeconomic indicators such as household consumption, investment, government spending, exports and imports, and Gross Domestic Product (GDP). The results show that active government intervention through increased state spending, social assistance programs, subsidies, and fiscal incentives can increase aggregate demand, expand employment opportunities, and strengthen people's purchasing power. Infrastructure development and international trade support have also been shown to contribute to expanding national production capacity and increasing global competitiveness. These findings confirm the relevance of Keynesian theory in the context of the Indonesian economy, where expansionary fiscal policy is not only capable of maintaining stability but also promoting sustainable economic growth. However, the implementation of such policies needs to be more focused on sustainability and social equity so that development outcomes can be more inclusive and just.

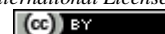
Keywords: Fiscal Policy, Keynesian Economics, Economic Growth, Effectiveness, Gross Domestic Product.

Abstrak

Artikel ini membahas efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan perspektif teori Keynesian. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019–2023, mencakup indikator makroekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor-impor, serta Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi aktif pemerintah melalui peningkatan belanja negara, program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal mampu meningkatkan permintaan agregat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya beli masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan dukungan perdagangan internasional juga terbukti berkontribusi dalam memperluas kapasitas produksi nasional dan meningkatkan daya saing global. Temuan ini menegaskan relevansi teori Keynesian dalam konteks perekonomian Indonesia, di mana kebijakan fiskal yang ekspansif tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu lebih diarahkan pada keberlanjutan dan pemerataan sosial agar hasil pembangunan dapat lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Keynesian, Pertumbuhan Ekonomi, Efektivitas, Produk Domestik Bruto.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan memiliki peranan strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat [1]. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial, terlebih ketika menghadapi gejala ekonomi global, ketidakpastian pasar, maupun dampak pasca-pandemi yang memengaruhi konsumsi, investasi, serta daya saing nasional [2].

Salah satu teori ekonomi yang relevan untuk memahami peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan adalah teori Keynesian [17]. Menurut Keynes, intervensi aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara, subsidi, dan program padat karya serta pengendalian moneter dapat

menstimulasi permintaan agregat sehingga mendorong aktivitas produksi dan kesempatan kerja. Pandangan ini berbeda dengan teori klasik yang lebih menekankan mekanisme pasar bebas.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara karena dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat [3]. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan per kapita naik dan kualitas hidup masyarakat juga ikut membaik [4]. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi [1]. Namun, dalam kenyataannya, mekanisme pasar bebas yang diyakini para ekonom klasik tidak selalu mampu menjaga keseimbangan ekonomi secara otomatis.

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sering menimbulkan masalah seperti pengangguran, inflasi, bahkan resesi [5]. Dalam situasi seperti itu, teori

Keynesian hadir dengan pandangan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan perekonomian. Teori Keynes mengubah cara mempelajari ilmu ekonomi. Awalnya, ilmu ekonomi hanya mempelajari hal-hal kecil, tetapi kini mulai memperhatikan kondisi ekonomi secara keseluruhan, yaitu makro [6]. Karena itu, teori kritik ekonomi politik yang dulunya muncul di masa klasik dan neo-klasik kini berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Selain itu, pemerintah mulai menganalisis kebijakan untuk memahami keadaan ekonomi negara [7]. Karena itu, diperlukan studi empiris untuk membuat kebijakan yang tepat. Akibatnya, metode analisis ekonomi berubah dari hanya deduktif menjadi induktif [8]. Teori Keynes sangat penting dalam membantu tumbuhnya perekonomian, terutama ketika sumber daya belum digunakan secara maksimal [9]. Teori ini juga sangat efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produksi.

Kebijakan fiskal dapat berupa peningkatan belanja pemerintah, program sosial, maupun investasi publik. Menurut Keynesianisme, pemerintah perlu menjadi stabilisator ekonomi dengan mengambil kebijakan untuk mengimbangi perubahan alami dalam kegiatan ekonomi [20]. Artinya, ketika ekonomi melambat, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran, baik melalui pengeluaran publik maupun insentif fiskal. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh, pemerintah harus mengurangi pengeluarannya [18]. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau wilayah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di bidang lain. Jika tidak ada pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pertumbuhan di sektor lain tidak akan tercapai secara maksimal [19]. Hal ini terjadi karena tanpa kondisi ekonomi yang memadai, fokus peningkatan kehidupan selalu terpusat pada tujuan jangka pendek [10].

Di Indonesia, intervensi pemerintah dalam perekonomian semakin terlihat jelas terutama saat menghadapi tantangan besar seperti krisis global, pandemi, maupun gejolak geopolitik. Pemerintah sering kali mengambil langkah kontrasyklis, yaitu meningkatkan pengeluaran ketika ekonomi melambat dan menekan pengeluaran ketika ekonomi terlalu panas [11]. Langkah-langkah ini sejalan dengan pemikiran Keynesian yang menganggap pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam mengatasi kegagalan pasar. Dengan begitu, analisis tentang efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditinjau dari teori keynesian sangat relevan untuk dikaji [12].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Keynesian tentang kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, mengkaji bagaimana implementasi kebijakan fiskal di Indonesia [13], serta menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis [14]. Dari sisi akademis, penelitian ini bisa memperkaya pemahaman mengenai penerapan teori

Keynesian dalam kebijakan ekonomi [15]. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan efektif sasaran [16]. Selain itu, manfaat sosial dari penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan bahwa campur tangan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ditinjau dari perspektif teori Keynesian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena ekonomi berdasarkan data empiris yang tersedia sekaligus mengaitkannya dengan teori ekonomi makro [18], khususnya yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes mengenai pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat melalui belanja negara [19].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dianalisis meliputi indikator makroekonomi utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor-impor barang dan jasa, serta produk domestik bruto (PDB). Periode penelitian dibatasi pada rentang tahun tertentu (2019–2023) untuk menangkap dinamika perekonomian, termasuk pengaruh pandemi COVID-19 dan kebijakan fiskal pemerintah dalam masa pemulihan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dan analisis tren. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan tiap variabel makroekonomi dalam kaitannya dengan intervensi kebijakan fiskal, seperti belanja pemerintah, subsidi, insentif fiskal, serta stimulus ekonomi lainnya. Sementara itu, analisis tren dilakukan untuk melihat arah pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan menilai efektivitas kebijakan fiskal terhadap perbaikan kondisi makroekonomi nasional. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mengaitkan data empiris dengan kerangka teori Keynesian, yaitu konsep permintaan agregat yang terbentuk dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan output nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianalisis melalui perspektif teori Keynesian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan

perkembangan berbagai indikator makroekonomi, antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor-impor barang dan jasa, hingga produk domestik bruto. Setiap indikator tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana intervensi kebijakan fiskal pemerintah, seperti peningkatan belanja negara, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan insentif fiskal, mampu memengaruhi komponen permintaan agregat sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynesian. Selanjutnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan LNPR ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR

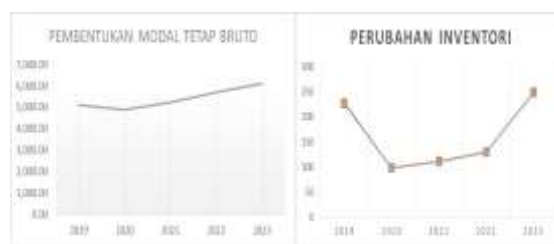
Kedua grafik tersebut, yakni Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), sama-sama menunjukkan tren yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Grafik konsumsi rumah tangga memperlihatkan peningkatan signifikan setelah 2020, terutama pada 2022 yang melonjak tajam. Hal ini menandakan adanya pemulihan daya beli masyarakat dan meningkatnya kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, konsumsi LNPR juga mengalami tren kenaikan yang konsisten sejak 2021 hingga 2023, menunjukkan semakin aktifnya peran lembaga non-profit dalam mendukung kebutuhan masyarakat, baik melalui pelayanan sosial, pendidikan, maupun kesehatan.

Dalam perspektif teori Keynesian, konsumsi rumah tangga dan LNPR merupakan bagian penting dari permintaan agregat yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, dan dalam kondisi krisis, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara atau memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan LNPR pada periode setelah pandemi mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal ekspansif pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pengeluaran konsumsi pemerintah ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Data pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia dari 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan fluktuasi kecil pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Dalam pandangan teori Keynesian, pengeluaran pemerintah adalah komponen penting dari permintaan agregat yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, terutama dalam infrastruktur dan layanan publik, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, teori Keynesian menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam situasi di mana sektor swasta mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak hanya membantu memperbaiki kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang proaktif dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya pembentukan modal tetap bruto dan inventori ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Inventori

Kedua grafik tersebut, yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori, sama-sama memberikan gambaran penting mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Grafik PMTB memperlihatkan bahwa setelah sempat menurun pada 2020 akibat pandemi, investasi dalam bentuk modal tetap kembali meningkat secara konsisten hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produktif, karena peningkatan PMTB mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi dan kepercayaan investor terhadap perekonomian. Sementara itu, grafik Perubahan Inventori memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam. Inventori turun drastis pada 2020, yang dapat dihubungkan dengan pelemahan permintaan dan gangguan distribusi akibat pandemi. Namun, setelah itu, inventori kembali meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada 2023, mencerminkan pulihnya aktivitas produksi dan meningkatnya ekspektasi permintaan di masa mendatang.

Dalam kerangka teori Keynesian, baik PMTB maupun inventori merupakan komponen penting dari investasi yang menentukan besarnya permintaan agregat. Keynes menekankan bahwa pemerintah dapat berperan aktif melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian insentif

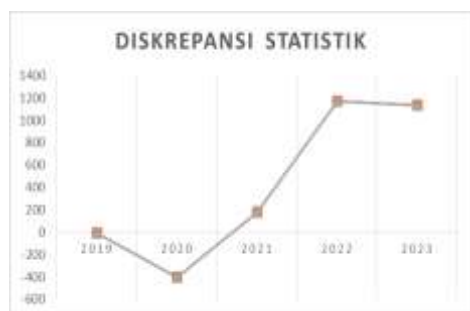
investasi, dan dukungan terhadap sektor produksi, untuk merangsang kenaikan investasi dan konsumsi. Peningkatan PMTB dan inventori setelah 2020 dapat diartikan sebagai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menggerakkan kembali roda ekonomi pasca resesi. Selanjutnya ekspor dan import barang dan jasa ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Ekspor dan Import Barang dan Jasa

Grafik ekspor dan impor barang serta jasa menunjukkan dinamika perdagangan internasional Indonesia selama periode 2019–2023. Ekspor mengalami penurunan pada 2020 akibat melemahnya permintaan global di masa pandemi, namun kemudian meningkat tajam hingga 2022 sebelum sedikit terkoreksi di 2023. Tren ini mencerminkan pulihnya daya saing produk Indonesia dan peningkatan permintaan eksternal. Sementara itu, impor juga mengalami pola serupa dengan penurunan pada 2020, lalu naik kembali hingga 2022 dan relatif stabil pada 2023. Kenaikan impor mencerminkan meningkatnya kebutuhan bahan baku, barang modal, dan konsumsi domestik seiring dengan pemulihan ekonomi.

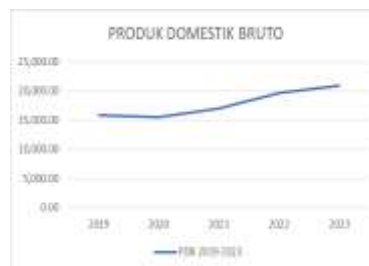
Dalam kerangka teori Keynesian, ekspor dan impor termasuk komponen penting dari permintaan agregat yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan bahwa pemerintah dapat memengaruhi keseimbangan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter, misalnya dengan memberikan insentif ekspor, menjaga stabilitas nilai tukar, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan ekspor setelah 2020 menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperluas pasar internasional, sementara kenaikan impor dapat diartikan sebagai tanda positif meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Dengan demikian, dinamika ekspor dan impor ini sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan perdagangan, fiskal, dan moneter mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemulihan pasca krisis. Selanjutnya diskrepansi statistik ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Diskrepansi Statistik

Grafik diskrepansi statistik menunjukkan adanya fluktuasi cukup tajam dalam kurun waktu 2019–2023. Pada 2019 kondisi relatif stabil, namun terjadi penurunan signifikan hingga negatif pada 2020, yang dapat dihubungkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan ketidaksesuaian pencatatan data ekonomi. Setelah itu, terjadi perbaikan pada 2021 dan lonjakan besar pada 2022, sebelum sedikit menurun namun tetap tinggi pada 2023. Diskrepansi statistik yang meningkat menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara perhitungan komponen Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan adanya dinamika yang kompleks dalam pemulihan, di mana beberapa sektor tumbuh lebih cepat sementara sektor lain masih tertinggal.

Menurut teori Keynesian, kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Keynes menekankan bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menstabilkan fluktuasi ekonomi, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan dalam permintaan agregat. Program stimulus, belanja pemerintah, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif berperan penting dalam mengurangi ketimpangan data dan memperkuat keandalan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya produk domestik bruto ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Produk Domestik Bruto

Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari 2019 hingga 2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun dengan fluktuasi yang mencerminkan dampak dari berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Dari tahun 2019 hingga 2021, PDB mengalami pertumbuhan yang terhambat, namun mulai tahun 2022, terlihat adanya pemulihan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berangsur-angsur kembali ke jalur pertumbuhannya.

Dalam perspektif teori Keynesian, fluktuasi PDB yang tajam menegaskan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas permintaan agregat. Keynes menekankan bahwa ketika terjadi krisis atau kontraksi ekonomi, pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal ekspansif, seperti meningkatkan belanja publik, memberikan stimulus, atau subsidi untuk mendorong konsumsi dan investasi. Sebaliknya, jika terjadi lonjakan ekonomi yang terlalu cepat, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangannya agar tidak menimbulkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, grafik ini menunjukkan bahwa sesuai pandangan Keynesian,

kebijakan pemerintah berperan vital dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menghindari terjadinya kontraksi ekstrem yang dapat merugikan perekonomian nasional. Realisasi dan implikasi Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Peran pemerintah dalam perekonomian mulai mendapatkan perhatian penting setelah John Maynard Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makro yang dikembangkannya [20]. Teori pengeluaran pemerintah Keynes didasarkan pada gagasan umum bahwa penurunan terus menerus sektor swasta menyebabkan pengangguran. John Maynard Keynes menyatakan bahwa kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara sehat dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan agregat dalam perekonomian. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pengeluaran pemerintah yang mendorong investasi dan konsumsi di dalam perekonomian. Melalui investasi dalam proyek infrastruktur dan program pekerjaan publik, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam mengatur siklus ekonomi. Menurut Keynesianisme juga, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengintervensi kondisi ekonomi dengan meredakan tekanan saat terjadi resesi dan mencegah pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat untuk mencegah inflasi. Akibatnya, tujuan utama kebijakan fiskal adalah pengendalian inflasi. Keynes juga menekankan bahwa kesejahteraan sosial dan keseimbangan pendapatan adalah tujuan lain dari kebijakan fiskal. Ini dapat dicapai melalui penerapan pajak progresif dan program sosial yang dapat mengurangi ketimpangan dan menawarkan perlindungan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Pandangan Keynes tentang kebijakan fiskal ini kemudian menjadi dasar untuk kebijakan ekonomi setelah Depresi Besar; dia melihat pemerintah sebagai aktor aktif yang harus mengawasi aktivitas ekonomi untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan. Sebenarnya, pertumbuhan pendapatan nasional lebih lambat daripada volume transaksi pemerintah di banyak negara. Tujuan ini dicapai dengan mengurangi pengeluaran pemerintah (G), transfer pemerintah (Tr), dan pajak yang diterima. Pengurangan ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Berikut Realisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah	Indikator Grafik yang Terdampak	Hasil pada Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan belanja pemerintah (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial)	Konsumsi rumah tangga, Konsumsi LNPRT	Meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan konsumsi sebagai komponen terbesar PDB
Program stimulus & bantuan sosial (PEN, BLT, subsidi energi dan pangan)	Konsumsi rumah tangga, LNPRT	Menjaga stabilitas konsumsi masyarakat pasca pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi
Insentif fiskal untuk dunia usaha (keringanan pajak, subsidi bunga, dukungan UMKM)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatkan investasi swasta, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja
Pembangunan infrastruktur strategis	PMTB, Ekspor-Import	Memperkuat daya saing, menekan biaya logistik, dan memperlancar arus perdagangan domestik maupun internasional
Dukungan perdagangan internasional (pembiayaan ekspor, insentif logistik, perjanjian dagang)	Ekspor-Import Barang & Jasa	Mendorong peningkatan ekspor, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, serta memperluas pasar internasional
Pembiayaan defisit fiskal melalui surat utang negara	Produk Domestik Bruto (PDB)	Memungkinkan pemerintah tetap ekspansif dalam belanja tanpa memangkas sektor strategis, sehingga menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan Tabel 1 kebijakan fiskal pemerintah dan dampaknya terhadap indikator makroekonomi, diketahui bahwa intervensi fiskal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan belanja pemerintah, program stimulus, serta bantuan sosial terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga maupun LNPRT sebagai komponen terbesar PDB. Di sisi lain, insentif fiskal dan pembangunan infrastruktur berhasil mendorong investasi melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sekaligus memperkuat kapasitas produksi nasional. Dukungan terhadap ekspor-impor juga memperlihatkan peran penting kebijakan perdagangan dalam menjaga keseimbangan permintaan agregat. Selain itu, pembiayaan defisit fiskal melalui surat utang negara memungkinkan pemerintah tetap menjalankan kebijakan ekspansif meski dalam kondisi penerimaan terbatas.

Dengan demikian, realisasi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya peran belanja negara untuk menggerakkan perekonomian. Kebijakan fiskal terbukti efektif dalam memperkuat konsumsi, investasi, dan perdagangan sehingga mampu menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

terutama pada periode pemulihan pasca pandemi.

4. Kesimpulan

Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam kerangka teori Keynesian. Intervensi aktif pemerintah, baik melalui peningkatan belanja negara, program bantuan sosial, subsidi, maupun insentif fiskal, terbukti mampu meningkatkan permintaan agregat, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya beli masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan dukungan terhadap perdagangan internasional juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas produksi nasional dan daya saing global. Kebijakan fiskal yang dijalankan secara ekspansif sejalan dengan prinsip Keynesian, yakni pemerintah harus hadir untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, implementasi kebijakan fiskal di Indonesia terbukti efektif dalam memperkuat konsumsi, investasi, serta perdagangan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, arah kebijakan ke depan perlu semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan sosial agar pembangunan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Daftar Rujukan

- [1] Zenou, Y. (2021). Paradoks Todaro Ditinjau Kembali. *Jurnal Elektronik SSRN*. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.866905>.
- [2] Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57–72. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>.
- [3] Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Perekonomian dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20. DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616).
- [4] Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, dan Elastisitas Fiskal terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. DOI: <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>.
- [5] Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, & Bonaraja Purba. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>.
- [6] Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57–72. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>.
- [7] Dewi, I. R., & Wijaya, S. (2023). Liberalisasi Perdagangan, Penanaman Modal Asing, dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak pada Emerging Asia dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnalku*, 3(2), 203–221. DOI: <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.467>.
- [8] Lili. (2023). Alokasi Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Sumatera Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 37–45. DOI: <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i1.73>.
- [9] Murtala, M. (2022). Analisis Fiscal Policy terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.22373/jep.v12i2.732>.
- [10] A., R. (1969). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3). DOI: <https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124>.
- [11] Azizah Syadza, H., Alya Gusnawati, W., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 75–83. DOI: <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317>.
- [12] Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Perekonomian dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20. DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616).
- [13] Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, dan Elastisitas Fiskal terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. DOI: <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>.
- [14] Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.35372/jpep.v5i1.11671>.
- [15] Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57–72. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>.
- [16] Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, & Bonaraja Purba. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>.
- [17] Bortis, H. (2023). Classical-Keynesian Political Economy, not Neoclassical Economics, is the Economic Theory of the Future. *Review of Political Economy*, 35(1), 65–97. DOI: <https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2063512>.
- [18] Gabaix, X. (2020). A Behavioral New Keynesian Model. *American Economic Review*, 110(8), 2271–2327. DOI: <https://doi.org/10.1257/AER.20162005>.
- [19] Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448. DOI: <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>.
- [20] Telles, K. (2023). The Commodity Reserve Currency Chapter: Friedrich A. Hayek, John Maynard Keynes, and the International Monetary Order. *Brazilian Journal of Political Economy*, 43(3), 619–645. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-31572023-3466>.